

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA SEKTOR PERIKANAN AIR TAWAR
(Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh:

TRI SUSILO
NPM. 1051010012

Program Studi : Ekonomi Islam

Pembimbing I : Hanif, S.E., MM.

Pembimbing II : Madnasir, SE., M.Si



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1437 H / 2015 M**

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA SEKTOR PERIKANAN AIR TAWAR
(Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh:

TRI SUSILO
NPM. 1051010012

Program Studi : Ekonomi Islam

Pembimbing I : Hanif, S.E., MM.

Pembimbing II : Madnasir, SE., M.Si



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1437 H / 2015 M**

ABSTRAK

Permasalahan muamalah merupakan masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, karena itu, pedoman dan tatanannyapun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan kehidupan sesama manusia. Salah satu kegiatan ekonomi adalah kerjasama (*syirkah*). Kerjasama ini merupakan kegiatan bisnis yang terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Kerjasama ekonomi khususnya pada sector perikanan air tawar ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo, dan apakah pelaksanaan sistem kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor perikanan air tawar masyarakat Desa Kalirejo sesuai dengan konsep kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo, dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor perikanan air tawar masyarakat Desa Kalirejo sesuai dengan konsep kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sampel dalam penelitian ini adalah 12 orang yang terbagi dalam 6 kelompok, teknik pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif.

Hasil temuan penelitian ini yaitu: Terdapat tiga sistem praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, yaitu: (a). Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik, petani ikan hanya mengelola saja; (b). Kerjasama antara pemilik dengan penggarap dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Pengelola dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. (c). Kerjasama antara pemilik dan penggarap, dimana keduanya ikut serta sama-sama memberikan porsi modal (biaya-biaya) dan keahlian. Tanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan ikan dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan.

Pelaksanaan sistem kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor perikanan air tawar masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo merupakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan konsep kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam, khususnya sistem yang pertama. Dan kerjasama tersebut dapat dikategorikan sebagai kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung madhaarat, dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik lahan (kolam) dan pembudidaya ikan, maka kerjasama bagi hasil sektor perikanan air tawar dibolehkan dan sesuai dengan ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp.(0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan terhadap skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Tri Susilo**

NPM : **1051010012**

Jurusan : **Ekonomi Islam**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Judul Skripsi : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA SEKTOR PERIKANAN AIR TAWAR (Studi di
Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung
Tengah)**

MENYETUJUI

Untuk dimonaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Hanif, S.E., M.M.

NIP. 197408232000031001

Pembimbing II,

Madnasir, SE., M.Si

NIP. 197504242002121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam,

Madnasir, SE., M.Si

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
LAMPUNG**

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp.(0721) 7510755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA SEKTOR PERIKANAN AIR TAWAR (Studi di Desa Kalirejo**

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh : Tri Susilo NPM :

1051010012, Program Studi : Ekonomi Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal :

Jum'at/23 Agustus 2016

TEAM DEWAN PENGUJI;

Ketua : H.Supaijo, S.H.,M.H.

Sekretaris : Diah Mukminatul H,M.E.Sy.

Penguji I : Hj. Madhiyah Hayati, S.P.,M.S.I.

Penguji II : Hanif, S.E., M.M.

DEKAN

Dr.Moh Bahrudin,M.A
NIP. 195808241989031003

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. Shaad : 24)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan pada orang-orang yang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Kedua orang tuaku yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu.
2. Untuk kakak (Pras), adik-adikku (ayu), dan Kaka Ipar Aku (Puji Astuti) beserta keluarga besarku yang telah banyak membantu materil maupun moril serta masukan hingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapainya cita-cita.
3. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 21 Febuary 1991, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, diantaranya Wahyu Dwi Prastyo dan Tri Susilo, Catur Ayu Kurniasih dari pasangan Bapak Darsito dan Ibu Sumarni Penulis kini bertempat tinggal Di Kaliwungu

Jenjang pendidikan penulis yaitu:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah lulus pada tahun 2004.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudhatul Huda Purwosari Metro Utara Kota Metro lulus pada tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhamadyah 1 Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah lulus pada tahun 2010.
4. Pada tahun 2008 penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Raden Intan Lampung jurusan Ekonomi Islam sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada mahasiswa;
2. Madnasir, SE., M.S.I, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan sekaligus sebagai pembimbing I, terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
3. Hanif, S.E., MM., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini;

5. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini;
6. Untuk teman-teman sekelasku di Jurusan Ekonomi Islam angkatan tahun 2010 yang tak dapat kusebut satu persatu yang selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
7. Untuk teman-teman yang selalu mendukung penulis sampai penulis menyelesaikan karya tulis ini (faisal,Kiyay Kiki,Riswan,Okie,Panji,dan Afqi)
8. Buat Bede Kantin maksih buat suport nya selama penulis menyelesaikan karya tulis ini,yang selalu mau menjadi Orang Tua kedua penulis,yang selalu mau mendengarkan keluh kesal penulis.
9. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Maret 2016.
Penulis

Tri Susilo
NPM. 1051010012

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 11 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 22 |
| A. Pengertian Kerjasama (<i>Syirkah</i>) | 22 |
| B. Dasar Hukum Kerjasama (<i>Syirkah</i>) | 27 |
| C. Rukun dan Syarat Kerjasama (<i>Syirkah</i>) | 29 |
| D. Pembagian Kerjasama (<i>Syirkah</i>) dan Macam-macamnya | 37 |
| E. Pembagian Keuntungan dalam Kerjasama (<i>Syirkah</i>) | 45 |
| F. Berakhirnya Kerjasama (<i>Syirkah</i>) | 47 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 50 |
| A. Sejarah Berdirinya Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 50 |

| | |
|--|-----------|
| B. Keadaan Geografis Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 52 |
| C. Keadaan Demografis Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 53 |
| D. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 55 |
| E. Keadaan Sosial Budaya Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 57 |
| F. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 58 |
| G. Struktur Organisasi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 60 |
| H. Praktek Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 63 |
| BAB IV ANALISIS DATA | 76 |
| A. Praktek Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 76 |
| B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Praktek Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo | 80 |
| BAB V PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran-Saran | 98 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1. Jumlah Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung | |
| Tengah Menurut Kelompok Umur | 54 |
| 2. Perincian Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung | |
| Tengah Menurut Lulusan Pendidikan Umum | 55 |
| 3. Perincian Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung | |
| Tengah Menurut Tingkat Ekonomi | 56 |
| 4. Perincian Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung | |
| Tengah Menurut Suku Bangsa | 57 |
| 5. Perincian Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung | |
| Tengah Menurut Agama | 59 |
| 6. Perincian Bangunan Peribadatan Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah | 60 |
| 7. Pendapatan Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Sebelum dan Sesudah Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1. Struktur Organisasi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah | 62 |
|---|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul: **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar (Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

Tinjauan Ekonomi Islam. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Adapun ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan dan aplikasi dari petunjuk dan aturan syari’ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumberdaya material agar tercipta kepuasan manusia, sehingga

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-9, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 1061

memungkinkan manusia menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.²

Menurut Chapra, ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid* (tujuan-tujuan syari'ah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.³

Berdasarkan pendapat tersebut, maka tinjauan ekonomi Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peninjauan luas atau pandangan luas sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam tentang praktik kerjasama sektor perikanan yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Praktik Kerjasama. Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan; perbuatan teori; pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori.⁴ Kejasama adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (perbuatan) yang dilakukan oleh beberapa orang.⁵ Kerjasama dalam ekonomi Islam disebut dengan *syirkah*. Kata *syirkah* berasal dari kata *syarika-yasraku-syarikah-syirkah*. Secara

² Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Yogyakarta, 2001, hlm. 7

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Cet. Ke-3, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 16

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 785

⁵ *Ibid.*, hlm. 488

etimologis berarti persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatan dan perhimpunan.⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat penulis tegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian secara ilmiah atas sebuah peristiwa yang ada berdasarkan pandangan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam tentang kerjasama masyarakat dalam melaksanakan bisnis ikan air tawar di desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara objektif, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan permasalahan dalam kegiatan mu'amalah yang sementara tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan mereka belum mengetahui sepenuhnya tentang keabsahan kerjasama tersebut sehingga penulis berminat untuk mengkaji hal tersebut secara ilmiah dalam penelitian ini.
2. Secara subjektif, aspek bahasan judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah khususnya jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, dan literatur yang diperlukan penulis tersedia di ruang perpustakaan, serta penulis merasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-2, Krapyak Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 765

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT. sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan.

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan dan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi kuat.

Dalam Islam, interaksi antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudari Berik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat. Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia

dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁷

Dalam kegiatan bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Akan tetapi, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa: 29).⁸

Ajaran tentang mu'amalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang di kandung oleh al-Qur'an dan al-hadis. Itulah sebabnya bahwa bidang mu'amalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian akidah, ibadah dan mu'amalah merupakan tiga rangkain yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dari induksi para ulama terhadap al-Qur'an dan al-hadis, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 15

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 58

mu'amalah di dalam kedua sumber hukum Islam, di antaranya⁹: *Pertama*, prinsip dasar dalam bermuamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengintari manusia itu sendiri. *Kedua*, Jenis dalam *mu'amalah*, hukum dasarnya, adalah boleh sampai ditemukan dalil-dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka *mu'amalah* itu dibolehkan.

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹⁰

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan bentuk produksi lainnya. Dan Islam memberkati manusia untuk melaksanakan pekerjaan di dunia ini dan menjadikannya sebagai ibadah, jika pekerjaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. viii

Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ekonomi Islam tidak menghendaki komoditi dan tenaga kerja terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi atau bekerja, supaya semua kebutuhan manusia terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat *itqan* (ketekunan) yang diridhoi oleh Allah yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.¹¹

Dengan begitu, maka tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT yang harus membudidayakan lahan supaya tidak punah. Oleh karena itu, di sinilah letak pentingnya kerjasama. Dengan kerjasama, pekerjaan sulit menjadi mudah, dan banyak manfaat yang dirasakan bila setiap orang bekerjasama, dalam hal ini kerjasama antara pemilik lahan dengan seseorang yang memiliki keahlian.

Kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹² Dalam Islam, kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari'atkan dalam agama. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang ataupun jasa.

Kerjasama dalam ekonomi harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah kesenjangan sosial. Ekonomi yang berdasarkan saling membantu dan kerjasama ini sendirinya menghendaki adanya organisasi kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Nilai yang ada dalam

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. Ke-3, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 123

¹² Depurtemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-9, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 554

prinsip ini adalah pengambilan keputusan secara konsensus dimana semua peserta mempertanggungjawabkan kepentingan bersama.¹³

Sesungguhnya masyarakat telah memberinya sesuatu, maka mestilah masyarakat mengambil sesuatu darinya, sesuai dengan apa yang dimilikinya. Inilah nilai-nilai indah yang mendapat perhatian para ulama Islam. Mereka menjadikan amal duniawi dari sudut ini sebagai kewajiban syari'ah.¹⁴

Kita memperoleh banyak makanan yang bernilai rizki tinggi dari hasil usaha para pekerja dalam bidang perikanan. Bidang perikanan termasuk usaha yang halal dan baik untuk digarap dan dikerjakan, sesuai dengan isyarat al-Qur'an, yaitu:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

*Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Maidah: 96).*¹⁵

Ratusan jenis ikan yang bertebaran dalam laut, danau-danau, dan sungai-sungai yang dijaring oleh para nelayan dengan mempergunakan peralatan konvensional maupun yang modern dan canggih. Di samping ikan-ikan di laut, danau dan sungai juga dapat diusahakan peternakan pada

¹³ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Informasi Sosial Ekonomi*, Cet. Ke-1, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta, 2007, hlm. 7

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cet. Ke-1, Robbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 157

¹⁵ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 319

empang-empang (kolam-kolam) dengan jenis-jenis tertentu pada air payau maupun air tawar.

Isyarat al-Qur'an mengenai perikanan merupakan himbauan agar pembacanya yang beriman mengambil bagian (berpartisipasi) dalam lapangan pekerjaan ini. Lapangan ini termasuk bidang amal shaleh, karena betapa banyaknya manusia yang menikmati daging segar dan kering yang bernilai gizi berkat hasil usaha para nelayan dan peternak ikan itu.¹⁶

Kita mempunyai bukti diberikan dorongan untuk membudidayakan tanah kosong. Hal ini bisa diqiaskan pada hadis Nabi yaitu:

بْنُ حَلَسَدٍ شَرِيًّا حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ هُ عَنِ عَمْرِو بْنِ حُمَيْدٍ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ رِئَاسَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا مَيِّتَةً فَهُوَ لَهُ .
(رواه أبو دود).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad bin Sirriy dan hambanya, dari Muhammad yakni Ibnu Ishaq dari Yahya bin Urwah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa menghidupkan tanah yang sudah mati maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Abu Dawud).¹⁷

Karena Islam mengakui kepemilikan tanah bukan menggarapnya dengan menerima sebagian hasilnya atau uang, akan tetapi bersamaan dengan itu dianjurkan agar seseorang yang mampu sebaiknya meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu (miskin).¹⁸

¹⁶ Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram*, Cet. Ke-1, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1997, hlm. 31-32

¹⁷ Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajstani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 3, Daar al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 226

¹⁸ M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-3, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 77

Kerjasama disektor perikanan air tawar ini mempunyai aturan main (*rules of game*), yang dapat tercermin dari aturan/ nilai-nilai Islam, aturan Undang-undang maupun adat istiadat/kebiasaan. Dari realita yang ada, praktik kerjasama yang menggunakan bagi hasil ini banyak yang mengikuti adat istiadat. Masyarakat menganggap kerjasama berbasis bagi hasil tersebut merupakan warisan turun temurun. Kalaupun praktik kerjasama yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, masyarakat cenderung tidak memahaminya.

Tidak banyak penelitian yang membahas kerjasama sektor perikanan air tawar dalam perspektif ekonomi Islam. Namun kemungkinan apakah kerjasama ini sesuai atau justru bertolak belakang dengan aturan nilai-nilai Islam. Untuk itu, penelitian ini akan membahas lebih dalam tentang konsep kerjasama yang masyarakat pada umumnya laksanakan. Kemudian melihat apakah konsep kerjasama ini terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at, seperti unsur ketidakadilan, keterpaksaan, atau bahkan gahar (ketidakjelasan akad atau kekuatan hukum).

Desa Kalirejo merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, desa tersebut sangat berpotensi dalam sektor perikanan air tawar. Penduduknya, banyak yang menggantungkan pada usaha pertanian dan keadaan cuaca, sehingga usaha sektor perikanan air tawarpun menjadi sektor usaha beberapa kelompok masyarakat, dan sudah menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja persoalannya tidak semua penduduk di sini mempunyai lahan atau kolam yang cukup luas.

Dari hasil kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi, sesuai dengan mekanisme pengolahannya dan kesekatan mereka dan sesuai dengan sistem kerjasama yang dilakukan.

Terkadang keuntungan yang diperoleh oleh penggarap (peternak ikan) itu tidak berbading dengan usahanya. Padahal yang menentukan maju mundurnya suatu usaha adalah pengelola usaha. Keadaan tersebut memang tidak adil karena hal tersebut berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Itupun terjadi dikarenakan dalam kerjasama antara pemilik lahan dan peternak ikan tidak dilandasi oleh hukum berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga terjadi ketidakadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai kerjasama antara pemilik lahan (kolam) dengan pengelola lahan (peternak ikan). Sehingga penulis akan mencoba melakukan penelitian dan akan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul penelitian: **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA SEKTOR PERIKANAN AIR TAWAR (Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor perikanan air tawar masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan konsep kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor perikanan air tawar masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai atau belum dengan konsep kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Secara praktis: dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan kerjasama ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam khususnya pada masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Secara teoritis: Dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman pada umumnya civitas akademika Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi

Islam pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

F. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan pada suatu objek. Dan penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang melaksanakan praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 32.

Selain itu, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.²⁰ Jadi yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.²¹ Dalam penelitian ini akan digambarkan praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sehingga akan diperoleh gambaran umum yang komprehensif tentang praktek kerjasama tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S dari Patton yaitu: “suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

²¹ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 58.

pemahaman, penafsiran dan interpretasi data”.²² Dengan demikian maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. *Data Primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²³ Adapun data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat yang melaksanakan praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampug Tengah.
- b. *Data sekunder* adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap dari pada data primer. Data sekunder ini penulis peroleh dari ruang perpustakaan dengan membaca, menelaah dan mencatat literatur-literatur atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti, baik itu berbetuk buku-buku, kitab-kitab, jurnal, kamus, dan sumber lainnya.

²² *Ibid.* hlm. 68

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III Cet. Ke-4*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 114.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Menurut Nana Sudjana, populasi adalah “Sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau obyek”.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang berdasarkan hasil prasurvey terdapat 6 kelompok peternak ikan air tawar yang setiap kelompok terdiri dari 2 orang, sehingga jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini yaitu 12 orang.

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Sebagaimana Suharsimi Arikunto, berpendapat bahwa sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.²⁶ Berdasarkan

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 57.

²⁵ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 23

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 62

keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifat akan diukur dan mewakili populasi yang ada.

Kemudian untuk menentukan besarnya sampel ini, maka penulis menggunakan pedoman sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yaitu “Untuk sekedar ancer-ancer, maka bila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.²⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 yaitu berjumlah 12 orang, maka penulis akan mengambil seluruh populasi yang ada, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berasal dari sumbernya penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dan metode lapangan. Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.²⁸ Dalam penelitian perpustakaan ini dilakukan dengan cara

²⁷ *Ibid.*, hlm. 64

²⁸ Kartini Kartono, *Op. Cit.*

membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik berupa al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku karangan yang berkaitan.

Kemudian di dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Interview

Interview menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini akan dipergunakan untuk memperoleh data tentang praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Metode Observasi

Metode observasi menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi yaitu "Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian".³⁰ Sedangkan Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa: "Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 64.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 54

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.”³¹

Dalam penelitian ini obeservasi yang di gunakan adalah observasi non partisipan. Penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang di observasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan yang objektif. Metode non partisipan ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian, hanya pada saat melaksanakan penelitian dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Koencara Ningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.³² Kemudian menurut Suharsimi Arikunto adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger”.³³

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapat informasi data

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 83

³² Koentjaraningrat, *Metodologi Peneitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 46.

³³ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 23

yang dibutuhkan yang berkaitan dalam penelitian ini, seperti sejarah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana.

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Adapun pengertian dari analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁴

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif yaitu metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat Khusus.³⁵ Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 28.

selanjutnya di analisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kerjasama (*Syirkah*)

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il mādhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhāri*), dan *mashdar* (kata dasar)nya ada tiga *wazn* (timbangan), boleh dibaca dengan salah satunya, yaitu: *syirkatan/ syarikatan/ syarakatan*; artinya persekutuan atau perserikatan.¹ *Syirkah* secara bahasa berarti (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.²

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *Syirkah*.³ Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁴ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Dalam buku *Menggagas Bisnis Islam*, *syirkah* berarti perseroan.⁵ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam kata *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Edisi ke-II, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 281

² Ghufron A. Mas'adi., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 191

³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003, hlm. 87

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit.*

⁵ Yusanto M. Ismail, et al., *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 126

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut istilah *syirkah* adalah akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang bersekutu/ bersero.⁶

Dalam kamus istilah fiqih, *syirkah* menurut bahasa ialah perseroan/ persekutuan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerjasama dalam usaha perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.⁷ Dalam *Suplemen Ensiklopedi Islam*, *syirkah* secara etimologi berarti percampuran antara satu harta dengan harta lainnya sehingga sulit dibedakan.⁸ Dalam buku ini juga terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ahli fiqih tentang *syirkah*. Ulama mazhab Maliki berpendapat, *syirkah* adalah suatu izin untuk bertindak hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Bagi ulama mazhab Syafi'i, *syirkah* adalah adanya hak bertindak hukum bagi dua orang/lebih pada sesuatu yang disepakatinya. Menurut mazhab Hanafi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan. Sekalipun definisi yang dikemukakan para ulama itu secara redaksional berbeda, pada dasarnya definisi mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang/lebih dalam

⁶ Nasution Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Sapdodadi, Jakarta, 1992, hlm. 907

⁷ M. Abdul Mujieb, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2004, hlm. 344

⁸ Abdul Aziz Dahlan (ads), *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 192

perdagangan. Apabila akad *syirkah* telah disepakati, maka semua pihak berhak bertindak hukum dan mendapat keuntungan terhadap harta serikat itu.⁹

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.¹⁰ Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹¹

Menurut Heri Sudarsono, *syirkah* berarti kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana yang telah ditetapkan dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹² Menurut M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹³

Berdasarkan pengertian *syirkah* di atas, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Intinya pengertian *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya

⁹ *Ibid.*, hlm. 193

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*: Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 317

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 125

¹² Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 52

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 161

ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudharabah*, sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian *financial*.

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat mewakili seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakili pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literature fiqih memberikan kebebasan kepada ptner untuk mengelola (*managing*) kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati.

Secara umum, pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*.¹⁴ *Syirkah amlak* mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, Jilid 4, hlm. 317

memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi.

Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbariyyah* dan *syirkah ikhtiyariyyah*. *Syirkah ijbariyyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiyariyyah* adalah *syirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan *syirkah al-Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang persangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudarabah*. Kerugian juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Fuqaha Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam, yaitu: *Syirkah 'Inan*; *Syirkah Mufawadah*; *Syirkah Abdan*; dan *Syirkah Wujuh*.¹⁵ Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam, yaitu: *Syirkah Amwal*; *Syirkah A'mal*; dan *Syirkah Wujuh*.¹⁶

¹⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 188

¹⁶ *Ibid.*

B. Dasar Hukum Kerjasama (*Syirkah*)

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.¹⁷ Adapun landasan hukum yang diperbolehkannya akad *syirkah* ini dapat dilihat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu:

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... ﴿١٢﴾

Artinya: ... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, ... (QS. An-Nisa: 12).

Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12 di atas menurut para ahli fikih berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian waris.¹⁸ Menurut Imam 'Ala Aldin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baqdadiy, para ulama sepakat bahwa berserikat dalam masalah waris itu diperbolehkan. Hal ini tergambarkan pada penafsiran ayat di atas.¹⁹

Selain ayat di atas, diterangkan pula dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24, yaitu:

¹⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Op.Cit.*, hlm. 192

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.Cit.*, hlm. 1711

¹⁹ Iman 'Ala Aldin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Bagdadiy, *Tafsir Al Khazin*, Juz 2, Daru al Kutud Al Ilmiah, Libanon, Beirut, 2005, hlm. 29

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ص وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24).

Ayat di atas menyebutkan bahwa الخُطَاء dalam tafsir *Al-Khazin* adalah berserikat yang biasanya (pada zaman Nabi Dawud) mendholimi satu sama lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan lafadz selanjutnya yaitu kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.²⁰

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12 menjelaskan perkongsian terjadi secara

²⁰ *Ibid.*, hlm. 273

otomatis (*jabr*) karena waris, sementara dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24 menjelaskan terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).²¹

Adapun hadis yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *syirkah*, antara lain sebuah hadits *Qudsi* diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

مَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَقَرُّفًا، قَالَ: قَالَ اللَّهُ يَهْدِي لِي: (ثَلَاثًا) مَا الشِّرْكُ مَا لَمْ يَخُنْ لِحَاكِمَا صَاحِبِهِ لِحَاكِمًا لَزِمَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمْ).

Artinya: “hadits yang diriwayatkan oleh abu dawud dari abu hurairah, dalam sebuah hadits marfu’, ia berkata, sesungguhnya allah berfirman, “aku jadi yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka”. (HR. Abu Daud).²²

Hadits ini menerangkan, bahwa Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menurunkan barakah pada harta mereka, memberi pengawasan dan pertolongan kepada mereka dan mengurus terpeliharanya atas harta mereka selama dalam perkongsian itu tidak ada pengkhianatan tetapi apabila ada pengkhianatan maka Allah SWT akan mencabut barakah dari harta tersebut.

C. Rukun dan Syarat Kerjasama (*Syirkah*)

Rukun dan syarat kerjasama (*syirkah*) merupakan hal penting, sebab kerjasama (*syirkah*) yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad kerjasama (*as-Syirkah*) tersebut akan dinilai tidak sah atau batal hukumnya.

²¹ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 130

²² Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syngkity, *Ath Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19, Darul Fikr, Bairut, 1995, hlm. 79

Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat kerjasama (*syirkah*) sehingga kerjasama itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*", artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.²³ Adapun ulama Hanafiyah,²⁴ mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqih, rukun adalah sesuatu tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.

Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilahistilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih yaitu: *Aqidaini* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*); *Sighot* (Ijab dan Qobul); dan *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*) yang dalam hal ini ada 2 macam, yaitu harta dan pekerjaan.²⁵

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama madzhab, menurut ulama Hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab ijab dan

²³ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh, Cet. Ke-3*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm. 300-301.

²⁴ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, Jakarta, 1996, hlm. 263-264.

²⁵ AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, Adhi Grafindo, Surabaya, 1994, hlm. 150

qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.²⁶ Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*. Tata cara ijab dan qabul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.²⁷

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk *syirkah Inan* sajalah yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain batal. Sedangkan rukunnya terdiri dari 3 bagian: *Shighat*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, dua orang yang bersekutu, dan harta sebagai modal.²⁸

Dalam rukun *syirkah* mempunyai syarat, yaitu sebagai berikut:

1. *Shighat*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada *ijab* dan *qabul* sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.

²⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 127

²⁷ AbdurRahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*

²⁸ Ali Fikri, *Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*, Mustofa al-Babil al Halabi, Mesir, tt., hlm. 236-237

- d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.
2. Dua orang yang berserikat, di dalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:
 - a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
 - b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
 - c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.²⁹

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *syirkah* yaitu:

1. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang;
2. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya;

²⁹ *Ibid.*

3. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya;
4. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut; dan
5. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.³⁰

Oleh karena itu aqad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakili dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat *syirkah* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah: orang yang berakal; baliqh; dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa: Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang); Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero

³⁰ Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Terjemah Moh. Rifa'i, et al. Terjemah *Khulashah Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra, Semarang, 1992, hlm. 210

yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu.³¹

Ulama Hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Berkaitan dengan bentuk *syirkah*, *syirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya mempunyai dua syarat:
 - a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*al-Maq'ud Alaih*). Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan.
 - b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui, atau ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad *syirkah* batal.
2. Berkaitan dengan *syirkah*, baik *syirkah* „*Inan* maupun *syirkah mufawadah*, mempunyai 3 (tiga) sifat:
 - a. Modal *syirkah* itu berupa mata uang emas atau perak yang sama nilainya. Seperti paund mesir, dan lain-lainnya. Keuntungan antara mereka sesuai dengan prosentasi yang mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian.
 - b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian.

³¹ Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1994, hlm.76

- c. Modal *syirkah* tidak berupa utang, sebab utang adalah uang ghoib (tidak hadir), sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir diwaktu perjanjian berlangsung.³²
- 2) Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah mufawadah*, yaitu:
- a) Nilai saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak modal, maka *syirkah* tidak sah.
 - b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baliqh.
 - c) Mempunyai agama yang sama. *Syirkah* orang muslim dengan non muslim tidak boleh.
 - d) Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan.³³
- 3) Berkaitan dengan syarat-syarat '*Inan*', yaitu:
- a) Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan.
 - b) Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham persero yang lain.
 - c) Setiap persero dapat diberikan tanggungjawab tanpa ikut serta rekannya yang lain.³⁴

Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu:

1. Para sekutu harus merdeka dan baliqh serta cakap.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 141 -142

³³ Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, hlm. 177

³⁴ Hamzah Ya" kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1992, hlm.

2. Sighot, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara *urf* baik perkataan maupun perbuatan.
3. Modal harus satu jenis.
4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan.³⁵

Imam Hambali menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah*, yaitu:

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya. Seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali.
2. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian. Seperti mensyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka waktu satu tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.
3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *syirkah*, yaitu ada beberapa perkara, ialah: a. Modal diketahui oleh para anggota. b. Modal itu hadir. Dijanjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang sudah diketahui, yang berifat serikat, seperti separoh, sepertiga atau semisalnya.³⁶

³⁵ Ali Fikri, *Op.Cit.*, hlm. 237

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 151

D. Pembagian Kerjasama (*Syirkah*) dan Macam-macamnya

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah*, para ulama' fiqh memberikan beberapa macam *syirkah*, sebagian ulama' ada yang memperoleh *syirkah* tertentu dan ada yang melarang *syirkah* tertentu pula. Ulama fiqh membagi *syirkah* dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*,³⁷ yaitu sebagai berikut:

1. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak adalah kepemilikan suatu jenis barang oleh lebih dari satu orang. *Syirkah* ini terjadi pada harta warisan, atau hibah kepada lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama dan diusahakan bersama. *Syirkah* dalam kategori terbagi menjadi dua bentuk:

- a. *Syirkah Ikhtiari*, bahwa dua orang dihibahkan atau diwasiatkan sesuatu, lalu mereka berdua. Demikian pula halnya jika mereka memberi sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang mereka beli itu sebagai *syirkah* milik.
- b. *Syirkah jabari*, adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tak mau harus demikian, artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses kepemilikan barang tersebut, misalnya harta warisan tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi mereka berdua.³⁸

251 ³⁷ H. Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 355

2. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud yaitu, bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.³⁹ Ulama fiqih berbeda pendapat tentang bentuk-bentuk serikat yang termasuk dalam *syirkah uqud* ini. Ulama madzhab Hambali membagi *syirkah uqud* dalam lima bentuk, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah mudharabah*. Ulama madzhab Syafi'i membatalkan semua bentuk *syirkah* kecuali *syirkah inan*.⁴⁰ Adapun ulama Maliki mereka membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh*.⁴¹ Sementara ulama madzhab Hanafi membagi *syirkah uqud* menjadi tiga bentuk yaitu: *syirkah bil maal*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, menurut mereka, ketiga bentuk perserikatan ini bisa masuk *al inan* dan bisa juga *al mufawadhah*.

Macam-macam *syirkah* tersebut akan dijelaskan satu persatu. Adapun macam-macam *syirkah* adalah:

1. *Syirkah 'inan* (شركة العنان)

Syirkah 'inan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuatu dengan jumlah modal. Dengan kata lain *syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Di dalam *syirkah* ini mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama

³⁹ *Ibid.*, hlm. 356

⁴⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 70-71

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 356

dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.⁴²

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah* „*inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini banyak dilakukan masyarakat karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berneda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.⁴³

Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 188

Sedangkan modal tidak boleh digunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali sudah dihitung nilainya pada saat transaksi, dan nilai tersebut akan digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syarat investasi itu harus jelas, sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang.

Perseroan model *'inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.⁴⁴

2. *Syirkah Mufawadhah* (الماوضة)

Arti dari *mufawadah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawadah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.⁴⁵ *Syirkah Mufawadhah* juga dapat didefinisikan dengan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya,

⁴⁴ Taquuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 156-157

⁴⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Op.Cit.*, hlm. 194-195

agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing melarang *syirkah mufawadhah* ini, kecuali Abu Hanifah yang membolehkannya. Menurut mazhab Hanafi tidak memperbolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Demikian juga dalam masalah kerja masing-masing pihak harus sama-sama bekerja.⁴⁶

Syirkah mufawadah ini mempunyai syarat-syarat yaitu: Harta masing-masing persero harus sama; Persamaan wewenang dalam membelanjakan; Persamaan agama; dan Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.⁴⁷

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk *syirkah mufawadah* ini. Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehan, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawadah* itu tidak boleh.⁴⁸

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufawadah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain,

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.Cit.*, hlm. 1712

⁴⁷ AbdurRahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 150

⁴⁸ Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm. 306

hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*.⁴⁹

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *syirkah 'inan* dengan *mufawadah*. Dalam *syirkah 'inan* hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam *syirkah mufawadah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan *mufawadah*, dikehendaki adanya dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.⁵⁰ Sedangkan Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.⁵¹

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam *syirkah mufawadah*, dalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jalalah*).⁵² Karena jenis akad *mufawadah* ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Lebih-lebih lagi tentang tercapainya persamaan (seperti yang dimintakan pesyarat) adalah sesuatu yang sukar, mengingat adanya *gharar* dan ketidakjelasan.⁵³

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, Al-Ma'arif, Bandung, 2002, hlm. 57-58

⁵⁰ Hamzah Ya'kub, *Op.Cit.*, hlm. 262

⁵¹ Ibnu Rusdy, *Op.Cit.*, hlm. 306

⁵² Hamzah Ya'kub, *Op.Cit.*, hlm. 262

⁵³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 177

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu di anggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila dari salah satu syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian „*inan* karena tidak ada kesamaan.⁵⁴

3. *Syirkah Abdan* (شركة الابدان)

Syirkah Abdan yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Syirkah* ini juga disebut *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdan* (*syirkah* fisik), atau *syirkah shana'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqbubbul* (*syirkah* penerimaan).⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa *syirkah abdan* adalah *syirkah* (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha pekerjaan, yang hasilnya/ upayanya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abu Hanifah dan Malik membolehkan *syirkah* ini. Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 190

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 179

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 1713

4. *Syirkah Wujud* (الوجود)

Syirkah wujud yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal. Jadi, *syirkah wujud* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian (masing-masing)).

Menurut Hanafi dan Hambali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing). Imam Syafi'i menganggap *syirkah* ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam *syirkah wujud*, tidak ada.⁵⁷

Di samping macam-macam *syirkah* telah disebutkan tadi, masih ada *syirkah* yang dianggap *syirkah* baru, yaitu *syirkah ta'awuniah* atau koperasi, menurut Mahmud Syaltut *syirkah ta'awuniah* itu merupakan suatu *syirkah* baru yang belum dikenal oleh Fuqaha dahulu.⁵⁸ Akan tetapi sebagian dalam ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak

⁵⁷ Nasrun Harun, *Op.Cit.*, hlm. 179

⁵⁸ Mahmud Syaltut, *Al Fatawa*, Darul Qalam, Mesir, tt., hlm. 394

menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan, usaha atas dasar membagi keuntungan (*profit sharing*) menurut perjanjian,⁵⁹ dan antara syarat sahnya *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan prosentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* itu. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *mudharabah*, tetapi dengan ketentuan tersebut di atas, maka akad *mudharabah* itu tidak sah (batal), dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah sepadan atau pantas.⁶⁰

Mahmud Syaltut sendiri tidak setuju akan pendapat tersebut, karena *syirkah ta'awun* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan Fuqaha. Sebab *syirkah ta'awun* itu modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha *syirkah ta'awuniyah* itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham itu ikut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan sistem perjanjian yang berlaku.

E. Pembagian Keuntungan dalam Kerjasama (*Syirkah*)

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 202

⁶⁰ Mahmud Syaltut, *Op.Cit.*, hlm. 348

dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Syari'at memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.⁶¹ Dalam *syirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama⁶² telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian.⁶² Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal

⁶¹ M. Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 238

⁶² Ibnu Rusdy, *Op.Cit.*, hlm. 304

yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.⁶³

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang didalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *syirkah*, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja. Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.⁶⁴

F. Berakhirnya Kerjasama (*Syirkah*)

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

⁶³ Taquuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam, Op.Cit.*, hlm. 157

⁶⁴ Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bakti Prima Yasa, Jakarta, 2002, hlm. 22

Pembatalan *syirkah* secara umum yaitu: Pembatalan dari seorang yang bersekutu, meninggalnya salah seorang *syarik*, salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang, gila, modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah* Harta *syirkah* rusak dan tidak ada kesamaan modal. Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli. Sedangkan tidak ada kesamaan modal yaitu apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

Adapun berakhirnya *syirkah*, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, ulama fiqh mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum yaitu:

1. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
2. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
3. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.

4. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.⁶⁵

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad perserikatan secara khusus, jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam *syirkah al-amwal*, akad perserikatan dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena obyek dalam perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.
2. Dalam *syirkah al-mufawadah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi.⁶⁶

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, (eds), *Op.Cit.*, hlm. 1715

⁶⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Desa Kalirejo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Desa Kalirejo adalah suatu Desa yang dibentuk atau didirikan pada tahun 1950 dan diresmikan pada tahun 1953 oleh pemerintah setempat sesuai dengan struktur pemerintahan pada waktu itu, dan kedudukan Desa Kalirejo mulai disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.¹

Semula, wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo sebagai perwakilan Kecamatan Padangratu di Kalirejo yang dibentuk tahun 1957, dan dibentuk sebagai wilayah administrasi Kecamatan tersendiri pada tahun 1964, dengan penempatan ibukota Kecamatan di desa/kampung Kalirejo. Desa Kalirejo ini terdiri dari 6 Dusun dengan jumlah penduduk 5.078 jiwa dan luas tanah secara keseluruhan berjumlah 753 Ha dengan rincian seluas \pm 448 Ha untuk sawah dan pertanian, sisanya untuk Pekarangan dan Pemukiman penduduk Kalirejo.²

Sebelum menjadi Desa Kalirejo, pada awalnya Desa Kalirejo merupakan sebuah daerah yang tidak ada penghuninya, hanya sebuah hutan dan sungai dengan sebutan Kali Sungai Rejo Subur. Desa Kalirejo mulai

¹ *Dokumentasi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

² *Dokumentasi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

didiami oleh masyarakat karena kedatangan masyarakat dari daerah Jawa Tengah yang jumlahnya kurang lebih berjumlah 15 kelompok keluarga dengan kepala rombongan Bapak Karto Sentono dari Kebumen, dan tokoh-tokoh yang lain yaitu Bapak Matkusni, Joyo Sumarto, Hasan Maria, Abdurrahman, Madkadi, Warditamo, dan Hasanudin.³

Kehidupan para rombongan pada saat itu hanya tinggal di rumah gubug yang terbuat dari anyaman bambu dari hasil anyamannya. Dari situlah mereka mulai menata kehidupan, dengan memenuhi kebutuhan hidup dengan menanam macam-macam sayuran dan kebutuhan yang diperlukan untuk penghidupan. Kemauan dan tekad yang tinggi kepala rombongan beserta rekan-rekan rombongan berkumpul dan membicarakan pendirian sebuah kampung, dan setelah tiga tahun mendiami lokasi tersebut, pada tahun 1953 berdirilah sebuah kampung atau Desa dengan nama Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.⁴

Setelah memiliki keturunan dan perkembangan zaman mulai berubah, penduduk Desa Kalirejo mulai ramai dan penduduk-penduduk baru mulai berdatangan untuk mendiami Desa tersebut, sehingga kini Desa Kalirejo tidak hanya berpenduduk masyarakat jawa, melainkan telah berbaur dengan suku-suku lain seperti suku Lampung, suku Padang, suku Batak dan suku Sunda. Dengan kehadiran warga baru akhirnya mereka bekerjasama membangun dan meningkatkan mata pencarian mereka dengan bertani. Dengan kehidupan yang

³ *Dokumentasi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

⁴ *Dokumentasi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

beraneka suku memberikan nuansa yang berbeda menjadikan dinamika kehidupan masyarakat Desa Kalirejo, sehingga Desa Kalirejo makin ramai kemajuan Desa sangat pesat.

B. Keadaan Geografis Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Secara administratif Desa Kalirejo terletak dipusat Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 5.078 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 1.561 KK. Adapun batas wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaliungu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sribasuki.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalidadi.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandung Baru.⁵

Hamparan wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo terletak pada 104°55'–105°02' Bujur Timur dan 05°09'–05°16' Bujur Selatan dengan kondisi geografis yaitu sebagai berikut :

1. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 54-132 m.
2. Banyaknya curah hujan 12,29 mm.
3. Curah hujan terbanyak bulan Desember s/d Maret.
4. Suhu udara rata-rata 30⁰ C.
5. Orbitasi (jarak pusat pemerintahan) sebagai berikut :

⁵ *Dokumentasi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 km. Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan roda dua (motor) yaitu 15 – 20 menit.
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah sekitar 56 km. Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan roda dua (motor) yaitu 1,5 jam – 2 jam.
- c. Jarak ke Ibukota Kabupaten terdekat (Ibukota Kabupaten Pringsewu) sekitar 17 km. Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten terdekat dengan kendaraan roda dua (motor) dengan waktu tempuh 45 – 55 menit.
- d. Jarak dari Ibukota Kecamatan Kalirejo ke Ibukota Provinsi Lampung di Bandar Lampung sekitar 78 km. Lama jarak tempuh ke Ibukota Provinsi Lampung dengan kendaraan roda dua (motor) dengan waktu tempuh sekitar 2 jam – 2,5 jam.
- e. Ketersediaan alat pengangkutan umum pada pukul 06.00 – 18.00 WIB/ setiap hari.⁶

C. Keadaan Demografis Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi pada 17 Desember 2016 dapat diketahui bahwa Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas tanah 753 Ha, dengan jumlah penduduk 1.561 KK atau 5.078 jiwa, dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 2.635 jiwa dan

⁶ *Dokumentasi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2014.

perempuan berjumlah 2.443 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah Menurut Kelompok Umur

| No. | Usia | Jumlah (jiwa) | Prosentase (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 0 – 5 tahun | 542 | 10,67 |
| 2. | 6 – 12 tahun | 596 | 11,74 |
| 3. | 13 – 18 tahun | 1.040 | 20,48 |
| 4. | 19 – 26 tahun | 965 | 19,00 |
| 5. | 27 – 35 tahun | 893 | 17,59 |
| 6. | 36 – 45 tahun | 684 | 13,47 |
| 7. | 46 – 55 tahun | 138 | 2,72 |
| 8. | 56 – 64 tahun | 152 | 2,99 |
| 9. | 65 tahun ke atas | 68 | 1,34 |
| Jumlah | | 5.078 | 100 |

Sumber : *Monografi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

Besarnya jumlah penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo tersebut di atas ada yang berpendidikan rendah dan juga berpendidikan tinggi, ada yang tidak lulus Sekolah Dasar dan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) saja, dan ada juga penduduk yang lulus dari SLTP/SMP dan SLTA/SMA, D-I, D-II, D-III bahkan ada juga penduduk yang berpendidikan Sarjana. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
 Perincian Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo
 Kabupaten Lampung Tengah Menurut Lulusan Pendidikan Umum

| No. | Pendidikan | Jumlah (jiwa) | Prosentase (%) |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Belum sekolah | 428 | 8,43 |
| 2. | TK/Taman Bermain | 239 | 4,71 |
| 3. | SD/Sederajat | 471 | 9,28 |
| 4. | SLTP/Sederajat | 455 | 8,96 |
| 5. | SLTA/Sederajat | 581 | 11,44 |
| 6. | Akademi D1-D3 | 420 | 8,27 |
| 7. | Sarjana/PT | 556 | 10,95 |
| 8. | Tidak Tamat SD | 85 | 1,67 |
| 9. | Tamatan SD/MI | 126 | 2,48 |
| 10. | Tamatan SLTP/SMP | 394 | 7,76 |
| 11. | Tamatan SLTA/SMA | 723 | 14,24 |
| 12. | Tamatan D1-D3 | 380 | 7,48 |
| 13. | Tamatan Sarjana/PT | 220 | 4,33 |
| Jumlah | | 5.078 | 100 |

Sumber: *Monografi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah mayoritas adalah lulusan dari SLTA/Sederajat. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dalam bidang pendidikan sudah tergolong maju, kondisi pendidikan seperti inilah yang pada akhirnya akan lebih mudah menerima berbagai macam perubahan sosial ekonomi dan agama dari luar masyarakat sekitar.

D. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar

adalah petani yang sebagian besar hanya berpendidikan atau lulusan SLTP dan SLTA, sedangkan mata pencaharian sebagai PNS sebagian besar lulusan dari Akademi atau Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perincian Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah Menurut Tingkat Ekonomi

| No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) | Prosentase (%) |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1. | Swasta | 184 | 3,62 |
| 2. | Petani | 621 | 12,23 |
| 3. | Buruh Tani | 425 | 8,37 |
| 4. | PNS | 157 | 3,09 |
| 5. | Bidan/Mantri | 18 | 0,35 |
| 6. | TNI/POLRI | 23 | 0,45 |
| 7. | Pengrajin | 104 | 2,05 |
| 8. | Pedagang | 75 | 1,48 |
| 9. | Peternak | 32 | 0,63 |
| 10. | Montir | 15 | 0,30 |
| 11. | Balita | 428 | 8,43 |
| 12. | Pelajar | 2.722 | 53,60 |
| 13. | Lain-lain | 274 | 5,40 |
| Jumlah | | 5.078 | 100 |

Sumber: *Monografi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2016.

Berdasarkan gambaran tabel di atas, maka dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, swasta, dan lainnya. Jenis usaha ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat sangat tergantung pada keadaan cuaca yang nantinya akan

mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang akhirnya mempengaruhi tingkat perkembangan penduduk.

E. Keadaan Sosial Budaya Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tergolong masyarakat heterogen, yang memiliki sifat dan sikap yang berbeda dalam menanggapi suatu permasalahan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta kesukuan yang berbeda-beda. Kenyataan ini diketahui bahwa kegiatan dan keadaan sosial kebudayaan tidak mengarahkan persamaan dan perbedaan.

Menurut hasil interview dengan Sekertaris Desa Kalirejo dapat diketahui bahwa pada masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa suku yang mendiami Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, yaitu: suku Jawa, suku Padang, suku Sunda, suku Lampung, suku Batak dan suku Melayu.⁷ Dari beberapa suku yang ada, suku ini banyak didominasi oleh suku Jawa, kemudian diikuti oleh suku-suku yang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian data dilihat dari suku bangsa dapat penulis sajikan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 3.4
Perincian Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah Menurut Suku Bangsa

| No | Suku Bangsa | Jumlah KK | Prosentase (%) |
|----|-------------|-----------|----------------|
| 1. | Jawa | 3.706 | 72,98 |
| 2. | Padang | 559 | 11,01 |

⁷ Nanang Kosim, Sekertaris Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *interview*, tanggal 18 Desember 2015.

| | | | |
|---------------|---------|--------------|------------|
| 3. | Sunda | 355 | 6,99 |
| 4. | Lampung | 201 | 3,96 |
| 5. | Batak | 152 | 2,99 |
| 6. | Melayu | 105 | 2,07 |
| Jumlah | | 5.078 | 100 |

Sumber : *Monografi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihatlah bahwa jumlah penduduk berdasarkan suku yang bertempat tinggal di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah adalah suku Jawa, kemudian suku Padang, suku Sunda, suku Lampung, suku Batak dan suku Melayu, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah adalah mayoritas pendatang, bukan penduduk asli daerah Lampung.

Adapun dalam bahasa komunikasi sehari-hari yang digunakan di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah selain menggunakan bahasa Indonesia tidak jarang pula bahasa-bahasa yang ada di lingkungan masyarakat dapat dikuasai, dimengerti, dan dapat dipergunakan oleh yang bukan sukunya. Seperti orang Jawa yang paham dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Sunda ataupun sebaliknya.⁸

F. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga sebagian

⁸ *Observasi* pada Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 17- 28 Desember 2015.

masyarakat yang memiliki kepercayaan dan menganut agama lain seperti pemeluk agama Kristen Protestas, Katolik, dan ada juga pemeluk agama Hindu. Walaupun berbeda dalam keyakinan, masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah memiliki toleransi yang tinggi antara sesamanya. Mereka saling menghormati pemeluk agama lain saat melaksanakan perintah agama yang diyakininya. Untuk lebih jelasnya tentang perincian penduduk menurut agama di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dapat terlihat pada tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 3.5
Perincian Penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah Menurut Agama

| No | Agama | Jumlah (jiwa) | Prosentase (%) |
|---------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1. | Islam | 4.720 | 92,95 |
| 2. | Protestan | 195 | 3,84 |
| 3. | Katolik | 137 | 2,70 |
| 4. | Budha | - | - |
| 5. | Hindu | 26 | 0,51 |
| Jumlah | | 5.078 | 100 |

Sumber : *Monografi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penduduk Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah mayoritas memiliki keyakinan atau beragama Islam yaitu berjumlah 4.720 (92,95%) jiwa dan pemeluk agama lain yaitu pemeluk agama Kristen Protestan berjumlah 195 (3,84%) jiwa, pemeluk agama Katolik berjumlah 137 (2,70%) jiwa, dan pemeluk agama Hindu berjumlah 26 (0,51%). Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya dapat dijadikan modal dasar bagi pembinaan keagamaan melalui kegiatan-

kegiatan sosial keagamaan, seperti kegiatan yasinan maupun kegiatan yang lainnya.

Adapun jumlah bangunan atau sarana peribadatan umat Islam dan pemeluk agama yang lain masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perincian Bangunan Peribadatan di Desa Kalirejo
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

| No | Bangunan Peribadatan | Jumlah (buah) |
|---------------|----------------------|------------------|
| 1. | Masjid | 5 |
| 2. | Mushalla | 18 |
| 3. | Gereja | 2 |
| 4. | Pure | 1 |
| Jumlah | | 26 |

Sumber : *Monografi* Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Dicatat tanggal 17 Desember 2015.

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bahwa peribadatan umat Islam di desa tersebut berjumlah 5 buah masjid dan 18 buah mushalla, sedangkan untuk peribadatan agama lain yaitu 2 gereja dan 1 pure. Tempat peribadatan tersebut menjadi sarana masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo maupun masyarakat desa lainnya.

G. Struktur Organisasi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

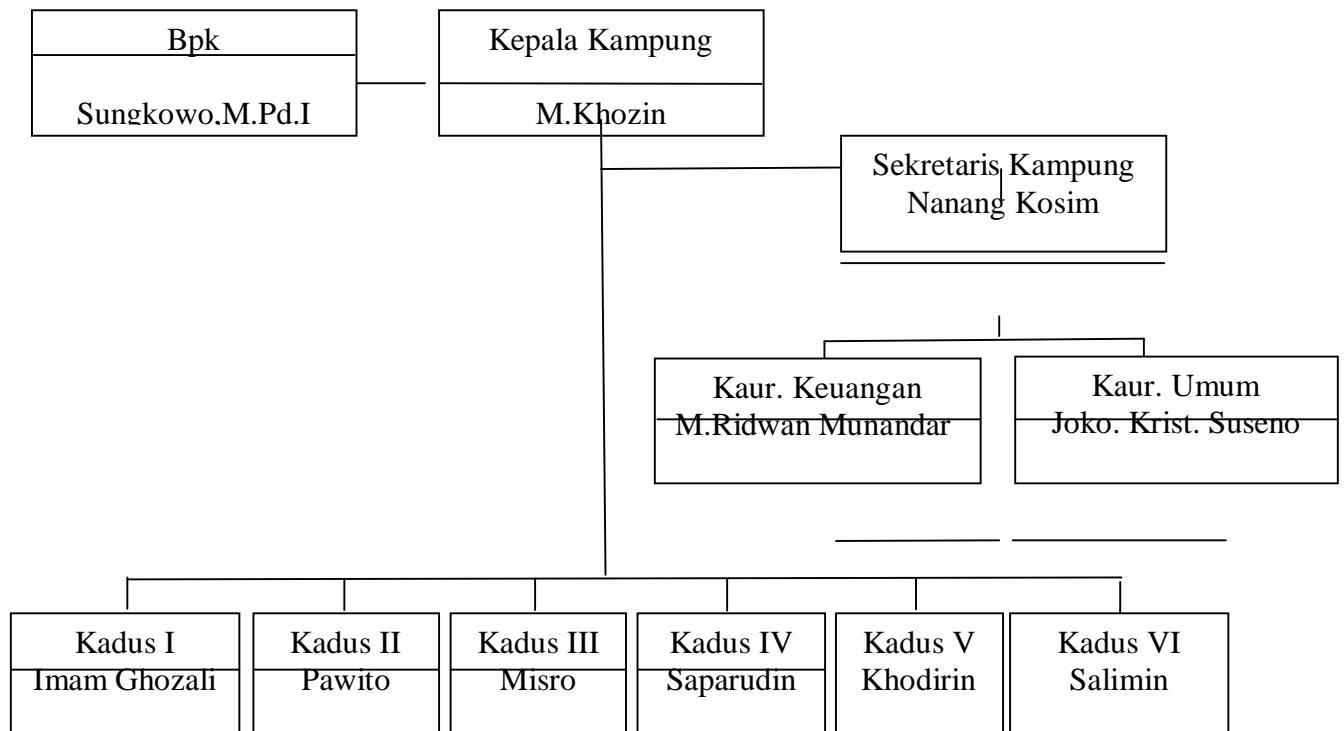
Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar

kerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan ke mana mereka harus berkonsultasi bila terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka.

Adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di dalam pelaksanaan tugas dapat terjadi sehingga koordinasi antara atasan dan bawahan akan terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini dapat diketahui melalui struktur yang ada di organisasi. Tugas dan tanggung jawab seorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut.

Adapun struktur organisasi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

Stuktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kalirejo



H. Praktik Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Pada hakikatnya, Islam membolehkan semua bentuk kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong antara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kali Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, kerjasama tersebut pada dasarnya adalah sarana untuk tolong menolong yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Selama proses penelitian berlangsung penulis mengadakan wawancara dengan beberapa responden, dari hasil interview tersebut penulis memperoleh suatu data bahwa ada beberapa bentuk sistem/ cara yang dipakai dalam usaha perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, yaitu kerjasama pemilik dengan penggarap dan sistem sewa tanah. Berikut ini akan penulis jelaskan sistem tersebut, yaitu:

1. Kerjasama Pemilik Tanah dengan Penggarap (Petani Ikan)

Kerjasama pemilik dengan penggarap dapat terjadi pada tiga macam cara. *Pertama*, kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik, petani ikan hanya mengelola saja, bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya penggarapan, porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kalirejo pada umumnya yaitu 70 : 30, bagian 70 adalah bagian dari pemilik tanah sekaligus pemberi modal, sedangkan

bagian 30 adalah bagian dari petani ikan. Dalam kerjasama seperti ini, tanggung jawab pemilik lahan adalah pada penyediaan lahan dan biaya-biaya selama penggarapan sampai panen. Tanggung jawab penggarap adalah dalam hal keahlian dan pembudidayaan ikan yang meliputi perawatan/ kontrol kolam dan ikan, pengairan dan memberi karapan (makan).

Kedua, kerjasama antara pemilik dengan penggarap dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Pengelola dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Dalam sistem kerjasama ini, pemilik hanya menunggu hasil panen, pemilik tidak turun andil dalam pengelolaan ikan. Tanggung jawab penggarap meliputi seluruh kegiatan pengelolaan dan biaya-biaya, sedangkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan ikan. Pada umumnya porsi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kalirejo adalah 40 : 60, dimana pembagian ini dilakukan setelah pengurangan keperluan perawatan sebelumnya. Kerjasama dengan sistem ini merupakan kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Kalirejo.

Ketiga, kerjasama antara pemilik dan penggarap, dimana keduanya ikut serta sama-sama memberikan porsi modal (biaya-biaya) dan keahlian. Tanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan ikan dilakukan secara

bersama-sama dengan ketentuan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan.⁹ Pada umumnya porsi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kalirejo adalah 65 : 35. Bagian 65 dari hasil pembagian adalah bagian dari pemilik tanah sekaligus pemberi modal dan ikut serta dalam pengelola pertanian ikan, sedangkan bagian 35 adalah bagian dari petani ikan ikut memberikan modal dan keahlian dalam pembudidayaan ikan air tawar tersebut.

2. Sistem Sewa Tanah

Sistem sewa tanah adalah suatu bentuk penyewaan tanah yang dibayar secara tunai. Pemilik tanah dalam hal ini menentukan harga sewa tanah yang harus dibayar secara tunai oleh penyewa (petani ikan). Dalam bentuk pengelolaan semacam ini semua hasil dari pertanian ikan menjadi milik petani ikan atau penyewa, sedangkan pemilik tanah hanya mendapatkan uang sewa. Jumlah uang sewa ditentukan dari lamanya penyewaan tanah. Pembayaran uang sewa yang masyarakat Desa Kalirejo laksanakan ditetapkan berdasarkan ukuran luas lahan, kemudian diperhitungkan dengan sejumlah uang. Rentang waktu penyewaan biasanya untuk satu musim yaitu selama 6 bulan atau sampai batas waktu yang ditentukan. Adapun tarif sewa tanah yang menjadi standar untuk satu musim adalah Rp.2.600.000,- per Ha.¹⁰

Kedua sistem kerjasama tersebut di atas merupakan kerjasama yang sering kali dilakukan oleh petani ikan dan pemilik tanah. Ada beberapa alasan

⁹ Kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diantaranya bapak Rahman, Amat, Kunandar, dan Wagino, *Interview*, tanggal 18, 21, dan 22 Desember 2015.

¹⁰ Kunandar, Pemilik Tanah untuk Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 22 Desember 2015.

diadakan kerjasama antara pemilik tanah dan petani ikan di Desa Kalirejo dalam pemberdayaan ikan air tawar, yaitu:

1. Karena faktor usia yang sudah lanjut, sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri, sehingga melakukan kerjasama dengan petani ikan.
2. Karena kesibukan pemilik lahan pada pekerjaan lain, sehingga pemilik lahan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengolah lahan yang dimiliki. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarap lahannya.
3. Karena letak lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya sehingga mereka menyerahkan lahannya kepada orang lain yang mau mengolah lahan tersebut.
4. Karena lahan yang dimiliki hanya sedikit sehingga dari pada diolah sendiri dan membutuhkan biaya yang banyak, lebih baik di serahkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan kesepakatan bagi hasil atau maro dalam bahasa sehari-hari.
5. Untuk mencari tambahan penghasilan yang dikarenakan lahan yang dimiliki hanya sedikit.
6. Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian untuk dikerjakan walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk dikerjakannya.
7. Untuk membantu antar sesama bagi orang yang mempunyai lahan dan berminat untuk melakukan budidaya ikan tetapi tidak punya keahlian

sehingga mereka membantu menggarapkannya dengan imbalan bagi hasil.¹¹

Beberapa alasan-alasan diadakan kerjasama pada sektor perikanan air tawar tersebut di atas merupakan alasan yang digunakan oleh mayoritas pelaku kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo, akan tetapi ada juga sebagian pemilik lahan beralasan semata-mata untuk tujuan bisnis, yaitu apabila tanah itu digunakan untuk budidaya ikan atau disewakan kepada petani ikan air tawar maka lahan tersebut akan terus menghasilkan, dan tidak semata-mata untuk menolong orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap merupakan dasar mereka melakukan kerjasama budidaya ikan air tawar dengan penggarap.

Berdasarkan dua macam atau cara dari bentuk kerjasama atau perjanjian praktik kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo tersebut di atas, kerjasama yang sering dilakukan oleh petani budidaya ikan adalah bentuk pertama, yaitu kerjasama pemilik tanah dengan penggarap (petani ikan). Sedangkan bibit ikan dan makanan serta obat-obatan berasal dari kedua belah pihak baik pemilik tanah dan penggarap, sedangkan biaya pengolahan serta perawatan berasal dari kedua belah pihak. Bentuk kerjasama budidaya ikan air tawar seperti inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Kalirejo dengan sistem bagi hasil.¹²

Budi daya ikan air tawar di Desa Kalirejo untuk sementara ini masih di dominasi oleh ikan Mas dan ikan Lele yang terdiri dari banyak varietas.

¹¹ Kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diantaranya bapak Rahman, Amat, Kunandar, dan Wagino, *Interview*, tanggal 18, 21, dan 22 Desember 2015.

¹² Amat, Penggarap atau Pelaku Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 18 Desember 2015.

Namun, pengadaan benihnya sulit diperoleh varietas unggul dan murni karena sudah banyak pencampuran. Jumlah benih ikan yang harus disediakan disesuaikan dengan luas lahan yang akan dikerjakan/diolah. Misalnya, untuk luas lahan 0,5 hektar dibutuhkan benih ikan sebanyak 5000 biji ikan. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka jumlah benih ikan seluruhnya disediakan oleh pemilik lahan, begitupun juga sebaliknya. Sedangkan apabila benih berasal dari keduanya, maka baik pemilik lahan dan petani ikan masing-masing memberikan modal separoh (setengah) untuk pembelian benih ikan.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut, bapak Kundandar mengatakan bahwa, ikan yang sudah mengalami pembenihan, pemijahan dan sekarang pemeliharaan pada proses pembesaran ikan yang siap untuk dikonsumsi. Untuk kolam berukuran 5000 m² atau 0,5 Ha diisi dengan bibit berukuran seibu jari atau bijian sebanyak 5000 biji ikan, dengan harga Rp.175 per ekor. Jika pemeliharaan dilakukan dengan baik, atau secara normal pada waktu selama 2 bulan maka ikan sudah dapat dikonsumsi atau dijual di pasar, akan tetapi apabila mengalami kendala-kendala, maka masa panen akan melebihi masa 2 bulan.¹⁴

Adapun jenis ikan dan kualitas benih ditentukan oleh keduanya, jenis benih ikan yang akan dibudidayakan dimusyawarahkan bersama antara pemilik tanah dan petani ikan, apabila telah sepakat maka jenis benih ikan

¹³ Wagino, Pemilik Tanah untuk Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 22 Desember 2015.

¹⁴ Kunandar, Penggarap atau Pelaku Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 18 Desember 2015.

yang telah ditentukan yang akan dibudidayakan. Hal ini didasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah bahwa jenis benih ikan apa yang sesuai dengan pangsa pasar dan kebutuhan masyarakat, atau kemampuan kedua belah pihak dalam pemeliharaan dari jenis ikan yang dipilih.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang peternak ikan air tawar di Desa Kalirejo menjelaskan bahwa apabila benih ikan ditentukan secara bersama maka tidak akan timbul perselisihan dan hasilnya pun dapat diketahui bersama antara kedua belah pihak bahwa ikan yang dibudidayakan dapat berkembang baik atau tidak. Hal tersebut berlangsung sejak awal perjanjian kerjasama budidaya ikan air tawar dengan sistem bagi hasil dan dilakukan hingga pemijahan kolam (panen) dan menentukan kembali kerjasama tersebut.¹⁶

Adapun tentang bentuk perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar ini, menurut penelitian yang penulis lakukan, dari beberapa informasi dari pemilik tanah dan petani ikan yang diteliti, seluruhnya (100%) melakukan perjanjian kerjasama budidaya ikan air tawar dilakukan secara lisan, tidak ada bukti tertulis apapun, baik itu bukti secara tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar, mereka melakukan kerjasama dengan kepercayaan yang telah membudaya di masyarakat sekitar dengan sistem kepercayaan.¹⁷

¹⁵ Ruswanto, Pemilik Tanah untuk Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 22 Desember 2015.

¹⁶ Kunandar, Penggarap atau Pelaku Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 18 Desember 2015.

¹⁷ Wagino, Pemilik Tanah untuk Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 22 Desember 2015.

Perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo dilakukan dengan cara sederhana. Inisiatifnya dapat datang dari pemilik lahan yang minta kesediaan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola kolam yang dibuatnya, maupun dari penggarap (petani ikan) yang meminta agar dapat mengelola kolam pada tanah milik orang lain. Namun pemilik kolam tidak begitu saja memberikan kolamnya kepada sembarang orang, mereka biasanya menentukan kepada siapa kolam diberikan untuk dikelola, dan diberikan kepada orang yang betul-betul punya kemampuan dalam mengelola budidaya ikan air tawar, bukan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola kolam tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka kerjasama disepakati kapan akan dimulai. Dalam perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo tidak memerlukan saksi untuk syarat sahnya, sehingga perjanjian terjadi dan dianggap sah meskipun tanpa saksi. Dengan demikian unsur kepercayaan menjadi unsur paling utama dalam perjanjian kerjasama ini.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa dalam perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar unsur kepercayaan lebih berperan dibandingkan unsur yang lain, hal ini terlihat dari pemilik kolam yang tidak terlalu memperlihatkan persyaratan dalam perjanjian kerjasama, tetapi lebih mementingkan kepercayaan kepada petani ikan untuk mengelola dan merawat kolam miliknya.

¹⁸ Kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diantaranya bapak Rahman, Amat, Kunandar, dan Wagino, *Interview*, tanggal 18, 21, dan 22 Desember 2015.

Mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo tidak dibatasi, apabila petani ikan yang bertugas untuk mengelola kolam masih memiliki kemauan untuk mengelola dan pemilik kolam bersepakat, maka perjanjian kerjasama tersebut dapat terus berlangsung, akan tetapi apabila si petani ikan merasa tidak mampu maka perjanjian kerjasama tersebut bisa diakhiri, bisa juga dilimpahkan kepada orang lain atau juga bisa dari pemilik kolam yang menginginkan perjanjian kerjasama tersebut berakhir karena hasil dari kolam yang selalu di peroleh tidak bagus atau kurang maksimal.¹⁹ Oleh karena jangka waktu perjanjian kerjasama tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian kerjasama tersebut dapat diakhiri dan dibatalkan kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik kolam dan petani ikan dapat mengakhiri perjanjiannya bisa kapan saja, meskipun ada kemungkinan dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut.

Sementara itu, apabila terjadi perselisihan atau persengketaan antara pemilik kolam dengan petani ikan di Desa Kalirejo, biasanya hal tersebut terjadi akibat adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak, karena kebiasaan dalam berakad menggunakan cara lisan dan tidak ada bukti tertulis maka akan sangat rentan sekali dengan perselisihan, misalnya: tentang bagi hasil yang tidak sesuai, tidak adanya ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kerjasama pertanian tersebut.

¹⁹ Kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diantaranya bapak Rahman, Amat, Kunandar, dan Wagino, *Interview*, tanggal 18, 21, dan 22 Desember 2015

Solusi yang biasanya dilakukan apabila terjadi perselisihan adalah dengan cara *Rembug Bareng* (musyawarah) antara kedua belah pihak, namun apabila dengan cara musyawarah masih buntu karena keegoisan dari masing-masing pihak, maka jalan tengahnya adalah meminta tolong kepada ulama setempat untuk menengahnya atau mendamaikannya. Itulah kebiasaan masyarakat Desa Kalirejo yang melakukan kerjasama sektor perikanan apabila terjadi perselisihan, karena sesungguhnya bagi mereka kebersamaan dan kekeluargaan yang mereka utamakan dari pada mementingkan keuntungan yang tidak ada artinya.²⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan dari hasil wawancara dengan beberapa responden masyarakat pemilik kolam dan petani ikan di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah di atas, khususnya yang berkenaan dengan kerjasama ekonomi pada sektor perikanan air tawar, maka dapat penulis simpulkan bahwa kerjasama ekonomi tersebut merupakan kerjasama yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, hal ini terlihat dari peningkatan ekonomi keluarga masyarakat peternak ikan itu sendiri.

Kerjasama sektor perikanan air tawar menurut para pelaku di wilayah obyek penelitian berbeda-beda, sebagian ada yang berpendapat bahwa kerjasama sektor perikanan air tawar bisa lebih menguntungkan dari pada bentuk pengolahan tanah yang lain, dengan alasan mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak, mereka hanya tinggal

²⁰ Rustam, Pemilik Tanah untuk Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 23 Desember 2015.

menerima hasil panen.²¹ Ada juga yang berpendapat bahwa dalam kerjasama sektor perikanan air tawar lebih banyak ruginya jika dibandingkan dengan untungnya yakni hasil yang diperoleh. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hasil panen kolam yang mereka terima tidak sebanding dengan tenaga, biaya dan waktu yang telah mereka keluarkan.²²

Pendapat lain mengatakan bahwa kerjasama sektor perikanan air tawar tersebut sama dengan apabila lahan tersebut dikerjakan sendiri, artinya baik pemilik lahan maupun petani ikan selaku penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan maksudnya hasil yang diperoleh sama dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk penggarapan kolam.

Menurut penulis, orang yang mengatakan bahwa dalam kerjasama sektor perikanan air tawar tersebut lebih banyak ruginya jika dibandingkan dengan keuntungannya, mungkin hal itu dikarenakan pada saat sekarang ini harga jual ikan hasil panen kadang menurun sedangkan harga makanan dan obat-obatan semakin tinggi, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dan perawatan kolam lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil panen ikan dalam kolam.

Menurut hasil data lapangan pada saat mengadakan penelitian, penulis memperoleh suatu data bahwa peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kalirejo salah satunya ditunjang oleh kerjasama sektor perikanan air tawar yang telah dilaksanakan. Menurut hasil interview, hasil kerjasama sektor

²¹ Kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diantaranya bapak Rahman, Amat, Kunandar, dan Wagino, *Interview*, tanggal 18, 21, dan 22 Desember 2015.

²² Kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diantaranya bapak Rahman, Amat, Kunandar, dan Wagino, *Interview*, tanggal 18, 21, dan 22 Desember 2015

perikanan air tawar memang tidak begitu besar, tapi pendapatan dari hasil kerjasama ini dapat menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Hal ini disebabkan karena selain mengadakan kerjasama pada sektor perikanan air tawar, masyarakat Desa Kalirejo juga tetap melaksanakan kegiatan pertaniannya yaitu dengan menanam tanaman kebutuhan pokok seperti padi, singkong, jagung dan sayur-sayuran.²³

Berdasarkan hasil data interview dan dokumentasi masyarakat yang melaksanakan kerjasama pada sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo, maka dapat diketahui bahwa kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kalirejo mengalami peningkatan pendapatan dari sebelum kegiatan kerjasama sektor perikanan air tawar dilaksanakan. Keberhasilan masyarakat Desa Kalirejo bukan hanya ditunjang oleh pekerjaan yang lainnya, akan tetapi karena kegigihan dan keuletan masyarakat dalam mengelola kerjasama pada sektor perikanan air tawar ini sehingga hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis gambarkan hasil pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan kerjasama pada sektor perikanan air tawar dalam satu kali panen ikan, yaitu:

Tabel 3.7
Pendapatan Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Sebelum dan Sesudah Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar

| No. | Nama Peternak Ikan | Sebelum Kerjasama | Setelah Kerjasama | Pendapatan Setiap Panen Ikan |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. | Amat | 1.400.000,- | 2.133.000,- | 6.400.000,- |
| 2. | Jumadi | 1.300.000,- | 2.300.000,- | 6.900.000,- |
| 3. | Kamran | 1.560.000,- | 1.967.000,- | 5.900.000,- |

²³ Rustam, Pemilik Tanah untuk Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, *Interview*, tanggal 23 Desember 2015.

| | | | | |
|-----|----------|-------------|-------------|-------------|
| 4. | Kunandar | 1.450.000,- | 2.083.000,- | 6.250.000,- |
| 5. | Ruswanto | 1.350.000,- | 2.350.000,- | 7.050.000,- |
| 6. | Sader | 1.600.000,- | 2.367.000,- | 7.100.000,- |
| 7. | Sapuan | 1.300.000,- | 2.297.000,- | 6.800.000,- |
| 8. | Santoso | 1.350.000,- | 2.650.000,- | 7.500.000,- |
| 9. | Sunar | 1.500.000,- | 2.267.000,- | 6.800.000,- |
| 10. | Tatang | 1.675.000,- | 2.280.000,- | 7.955.000,- |
| 11. | Wagino | 1.450.000 | 2.250.000,- | 6.150.000,- |
| 12. | Wawan | 1.200.000,- | 2.225.000,- | 6.675.000,- |

Sumber: *Dokumentasi*, Masyarakat yang Bekerjasama Sektor Perikanan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, dicatat tanggal 24 Desember 2015.

Berdasarkan gambaran tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat yang melaksanakan kerjasama pada sektor perikanan air tawar setiap panen ikan terlihat cukup menjanjikan, namun pendapatan tersebut merupakan pendapatan keseluruhan setiap kali panen hasil kolam yang diperoleh selama dua bulan sepuluh hari. Tabel di atas juga menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat yang melaksanakan kerjasama pada sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dari sebelum melaksanakan kerjasama sektor perikanan air tawar tersebut. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan pokok dari hasil kerjasama sektor perikanan air tawar, sedangkan pendapatan yang lain dari petani yaitu pendapatan yang dihasilkan dari membuka toko di pasar-pasar atau di rumah dan dari kegiatan kerja buruh perkebunan dan lain sebagainya.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktek Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Pada bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian mengenai TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA SEKTOR PERIKANAN AIR TAWAR. Secara ekonomi, mata pencaharian masyarakat lokal meskipun mulai terdiversifikasi ke sektor-sektor alternatif (pola nafkah ganda), tetapi sifatnya temporer dan belum signifikan meningkatkan pendapatan. Akibatnya dari aktivitas ekonomi di masing-masing desa, hanya terdapat segelintir orang yang memiliki modal cukup yang menikmati hasil kerja sebagian besar warga Desa yang tetap terjebak dalam kemiskinan (pola penghisapan). Oleh karena rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan dan ketertinggalan informasi dan teknologi menyebabkan masyarakat tidak memiliki posisi tawar dalam politik. Akibatnya mereka cenderung hanya bisa pasrah dan menuruti keputusan-keputusan politik yang dibuat di level atas (Pemerintah, instansi teknis dan golongan pengusaha) tanpa mengetahui persis apa manfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa.

Setiap kehidupan tentu memerlukan suatu strategi nafkah rumah tangga, di mana ia merupakan landasan pilihan aktivitas nafkah yang dilakukan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan

rumah tangga. Sedangkan aktifitas nafkah adalah tindakan anggota rumah tangga yang dapat dilihat sebagai bentuk strategi nafkah. Strategi nafkah ini dapat mengacu pada program dan kebijakan yang dijalankan pada keseluruhan tingkatan masyarakat. Konsep strategi kemudian dihubungkan pada pilihan dan kekuasaan serta pola-pola interaksi dalam masyarakat.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kalirejo melakukan kegiatan usaha baru dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yakni melalui kerjasama sektor perikanan air tawar. Usaha sektor perikanan merupakan salah satu usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Kalirejo. Dalam bidang usaha budidaya ikan ini, masyarakat Desa Kalirejo melaksanakan kerjasama sektor perikanan air tawar guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Para masyarakat petani ikan yang tidak memiliki lahan untuk usaha budidaya ikan, masyarakat melaksanakan kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya secara mandiri.

Kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo sangat menguntungkan kedua belah pihak dan layak untuk dijadikan usaha dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya. Masyarakat petani ikan mulai memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka dengan memanfaatkan lahan-lahan persawahan yang tidak dikelola sebagaimana mestinya oleh para pemiliknya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, penulis menganalisis bahwa kehidupan masyarakat petani ikan Desa Kalirejo cukup berkembang baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan agama. Pada segi ekonomi terlihat bahwa masyarakat menggunakan strategi yang pada umumnya masyarakat Desa Kalirejo gunakan yaitu dengan mementingkan kualitas hasil ikan peliharaan, masyarakat pun dapat menerima dan menerapkan strategi tersebut.

Kondisi proses kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo didasarkan pada pola kemitraan dengan dasar kepercayaan, yang mampu mewujudkan keadilan yang merata, sehingga pola kemitraan yang muncul di masyarakat petani ikan air tawar mampu menguntungkan kedua pihak yang bermitra. Dengan latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan dan menguntungkan yaitu petani ikan air tawar membutuhkan kolam untuk pemberdayaan ikan, sedangkan pemilik kolam membutuhkan tenaga dan kemampuan petani ikan untuk mengfungsikan tanah miliknya. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka kemitraan (bekerjasama) merupakan alternatif yang baik dalam kegiatan sektor perikanan air tawar, mulai dari pembuatan kolam, memasukkan bibit ikan, perawatan, sampai dengan pemanenan ikan dari kolam.

Kemitraan merupakan etika yang memerlukan kepedulian, dan pengorbanan karena makna kongkret mitra adalah teman. Prinsip utamanya adalah *simbiosis mutualisme* (saling memerlukan dan membutuhkan melalui persekutuan ekonomi atau saling menguntungkan). Kontribusi masing-masing pihak dapat berupa modal atau barang, tenaga dan kemampuan atau kedua-

duanya. Inti dari kemitraan ini adalah penanaman, pemeliharaan dan pemanenan, sehingga kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama sektor perikanan air tawar dapat dijadikan salah satu potensi ekonomi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga dalam pemenuhan hidup sehari-hari, hal ini disebabkan karena ikan yang merupakan hasil dari kolam, untuk tingkat lokal sendiri dapat dijadikan konsumsi masyarakat sehari-hari. Jika ada suatu pembelajaran yang baik pasti suatu saat akan menjadi salah satu komoditi ekspor. Dengan memanfaatkan potensi lahan yang masih luas untuk dijadikan tempat sector perikanan air tawar, secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Selain itu, dari sisi ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo yang pada awalnya bermata pencaharian sebagai buruh dan petani padi mengalami peningkatan pendapatan ketika masyarakat melaksanakan kerjasama sektor perikanan air tawar tersebut. Petani ikan melaksanakan kerjasama sektor perikanan air tawar dengan pemilik kolam dengan sistem bagi hasil (keuntungan). Sistem kerjasama sektor perikanan air tawar ini merupakan peluang bisnis atau alternatif yang dapat diusahakan petani ikan untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan.

B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Praktek Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Hukum muamalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi yang lain tidak diperbolehkan. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut ini :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوَاقِظِ .

“Tidak diingkari bahwa dalam berubahnya suatu hukum seiring dengan perkembangan zaman”.¹

Kaidah ushul ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemashatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum harus mampu mengakomodasi problematika masyarakat seiring perkembangan zaman. Dengan ini akan tercermin *fleksibilitas* dan *elastisitas* suatu hukum.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti Sunnah Rasul. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang dimasyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan mencoba untuk

¹ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawaa'idul Fiqhiyyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm. 107.

melakukan analisis terhadap praktek kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo, khususnya akad yang menyangkut modal dan pembagian hasil panen kolam dan jangka waktu kerjasama dalam pandangan ekonomi Islam.

Menurut ketentuan ekonomi Islam, materi akad kerjasama sektor perikanan air tawar meliputi modal dan pembagian keuntungan; yang mana kedua materi akad tersebut harus dinyatakan secara jelas dan adil, dan yang lebih penting adalah mengenai sistem pengolahan usaha yang menjamin hak-hak pemilik modal.

Pada hakekatnya, kerjasama bagi hasil sektor perikanan air tawar sama dengan *syirkah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerjasama dalam usaha perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.

Pembahasan sebelumnya menyebutkan bahwa pelaksanaan kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo dalam hal pembagian hasil panen yang dilakukan dipengaruhi oleh modal yang diberikan dalam budidaya ikan. Meskipun pada awal kerjasama disebutkan persentase bagi hasilnya, tetapi pada saat pembagian, terkadang hasil tidak sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini dikarenakan pengelola kolam dalam bagi hasil memperoleh bagian lebih sedikit dari pemilik kolam, walaupun dalam perjanjian bagi hasilnya 65 : 35 akan tetapi dirasakan oleh penggarap bagiannya tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan selama pengelolaan kolam. Di samping itu juga akad yang berkaitan dengan jangka waktu kerjasama sektor perikanan air

tawar tidak ditentukan secara jelas, sebagaimana aturan yang digariskan dalam syariat Islam.

Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas beragama Islam, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam. Masyarakat yang bekerja sebagai pembudidaya ikan air tawar, dalam hal ini adalah kerjasama sektor perikanan dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

Pelaksanaan kerjasama sektor perikanan air tawar berdasarkan modal yang diberikan dan jangka waktu perjanjian yang dilakukan demi meningkatkan ekonomi keluarga tersebut akan penulis kaitkan dengan pandangan ekonomi Islam. Apakah kerjasama sektor perikanan air tawar yang dilakukan masyarakat di Desa Kalirejo telah sesuai dengan ekonomi Islam atau sebaliknya.

1. Modal dan Pembagian Keuntungan

Masalah pembagian hasil kolam yang dilakukan masyarakat Desa Kalirejo berdasarkan kesepakatan pada modal yang diberikan, sebagaimana telah dijelaskan dalam penyajian data (Bab III) memang belum penulis temukan pedoman khusus mengenai tata cara pembagiannya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasul (al-Hadits) secara eksplisit.

Pembagian persentase kerjasama sektor perikanan air tawar dengan sistem bagi hasil panen kolam, menurut penulis hanya tertuang dalam pendapat ahli fiqh yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik

dijelaskan oleh para ahli fiqh tersebut, maupun oleh para sahabat dan tabi'in. Menurut Jumhur Ulama, syarat yang berkaitan dengan hasil adalah, pembagian hasil kolam harus jelas (persentasenya) dan hasil panen kolam itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Dalam hal syarat kedua, yaitu penulis belum menemukan penjelasan mengenai maksud kalimat “disisihkan lebih dahulu sekian persen”.

Pembagian hasil ikan dalam kolam yang dilakukan oleh masyarakat pelaku kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo, yakni dengan cara melakukan pengurangan modal sebanyak yang disetorkan diawal perjanjian terhadap hasil ikan kolam yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang di kemukakan adalah bahwa pengurangan modal terhadap hasil ikan yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal yang telah diberikan/dimodalkan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk usaha budidaya ikan selanjutnya agar ketika akan melaksanakan kerjasama sektor perikanan air tawar tidak kesulitan mencari modal, namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik kolam dan pembudidaya ikan melakukan perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Berbicara tentang modal, kerjasama antara pemilik kolam dengan pembudidaya ikan air tawar dengan sistem bagi hasil kolam, terdapat

ketentuan-ketentuan mengenai pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang telah diinvestasikan. Keuntungan merupakan pertumbuhan modal, kerugian adalah reduksi atau pengurangan modal.

Menurut ahli fiqh pengikut Syafi'i, apabila satu pihak menyediakan dan pihak lain menjalankannya dalam usaha, maka yang terpenting adalah bahwa keuntungan disediakan untuk mereka sendiri, kemudian mereka membaginya. Bagian untuk setiap pihak ditetapkan berdasarkan pemberian jumlah bagian dari "keseluruhan" untuk satu pihak. Jika keuntungan yang ditetapkan untuknya di luar keuntungan-keuntungan tertentu, maka perjanjian akan menjadi batal. Ahli-ahli fiqh pengikut Syafi'i dan Maliki juga berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah modal yang diinvestasikan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagikan kepada pihak manapun.

Pembagian hasil kolam tiap pihak harus dilakukan berdasarkan perbandingan prosentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan prosentase keuntungan dari hasil kolam harus ditentukan dalam kontrak kerjasama (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat

menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut. Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i pembagian hasil panen tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi bibit (modal) yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil kolam. Sedang menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi bibit (modal) yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara setiap pihak.

Para pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan bagi hasil dengan kontribusi bibit (modal) yang disertakan dalam perjanjian, sedangkan menurut pengikut mazhab Hanbali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan secara fleksibel. Setiap pihak dapat membagi hasil (keuntungan) berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya pihak yang memberikan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan modal dapat memperoleh $\frac{1}{2}$ atau lebih dari keuntungan.

Menurut penulis tidaklah penting dalam perjanjian bahwa keuntungan hasil sektor perikanan air tawar dibagi dalam porsi sama diantara pihak, karena hukum membolehkan pembagian keuntungan hasil sektor perikanan air tawar dalam porsi sama atau tidak sama. Prinsipnya setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan dari hasil sektor perikanan air tawar yang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu modal (bibit), peran dalam pekerjaan, dan tanggung jawab dalam perjanjian.

Singkatnya, hasil budidaya sektor perikanan air tawar akan selalu di bagikan dalam jumlah yang sesuai dengan modal yang ditanamkan. Menurut ulama mazhab Syafi'i kalau pemilik modal memberikan kepada kawannya sebagian bibit yang belum terbagi dari hasil (keuntungan) sebagai imbalan tenaga kerjanya mengolah lahan (kolam), maka bentuk kerjasama sektor perikanan air tawar macam ini dianggap sah. Adapun hasil kesepakatan para ulama (ijma') menyatakan bahwa dalam kerjasama *syirkah* adalah bagian yang merata dari hasil tanah, misalnya $\frac{1}{2}$ -nya, $\frac{1}{3}$ -nya, atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa syarat *syirkah* dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat muslim Desa Kalirejo yang menjadi lokasi penelitian. Meskipun demikian, tata cara pembagian hasil ikan kolam tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya apabila modal yang akan dikelola berasal dari kedua belah pihak, maka sebelum hasil panen dibagi, terlebih dahulu dilakukan pengurangan modal terhadap hasil kolam sebanyak jumlah modal yang diserahkan diawal pembudidayaan sektor perikanan air tawar. Kemudian sisanya dibagi antara keduanya secara kesepakatan. Sedang dalam syara' dijelaskan apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada hukum Islam

sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh bahwa adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum.

2. Jangka waktu Perjanjian Penggarapan Sawah

Menurut Jumhur Ulama, syarat sahnya *syirkah* yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga *syirkah* sendiri tidak sah tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya. Iman Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu: Masa atau waktunya ditentukan; Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan lahan sampai selesai; dan Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad *syirkah* juga akan dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu atau masanya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa masyarakat pelaku kerjasama sektor perikanan air tawar dengan sistem bagi hasil di Desa Kalirejo dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen atau yang lainnya. Maka praktek tersebut dapat dikatakan sah menurut pendapat ulama Hanafi atau tidak sah menurut Jumhur Ulama.

M. Najetullah Shidieqy memberikan ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha sebagai berikut:

- a. Setiap pihak boleh membatalkan perjanjian kapan saja. Jika jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak

yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujuinya.

- b. Perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu.
- c. Perjanjian berakhir dengan kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut, kemudian persetujuan dapat dilanjutkan oleh pihak yang masih ada apabila perjanjian tersebut melibatkan lebih dari dua pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa akad bagi hasil sektor perikanan air tawar sebagaimana diketahui sama dengan *mudharabah*, dimana dalam *mudharabah* tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Karena *mudharabah* merupakan akad yang *jaiz*, artinya setiap pihak boleh membatalkannya kapan saja. Namun demikian, Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai *kemaslahatan*, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Sedangkan berdasarkan uraian sub 1 dan 2 secara umum, meskipun pelaksanaan kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo khususnya tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil panen ikan yang merupakan keuntungan yang di peroleh serta jangka waktunya belum sesuai dengan konsep kerjasama dalam pandangan ekonomi Islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah

ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah yang berbunyi: “*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*”.²

Untuk memenuhi ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yaitu: Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa ‘*adah* tidak mungkin berkenaan dengan maksiat’; perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang; tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits; dan tidak mendatangkan *kemadlaratan*.

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa termasuk ‘*urf*’ yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad. Tata cara pembagian hasil panen kolam berdasarkan asal modal yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri. Oleh karena itu, pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai ‘*urf*’ yang dapat dijadikan sumber hukum.

- a. Semua pelaksanaan pembagian prosentase hasil kolam jelas dilakukan berdasarkan pada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Desa Kalirejo dalam

² *Ibid.*, hlm. 86.

melakukan perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.

- b. Pelaksanaan perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo dapat dikatakan sesuai dengan syara', dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-ha yang dilarang oleh hukum Islam.
- c. Perbuatan kerjasama bagi hasil sektor perikanan air tawar mengandung kemaslahatan. Dengan kerjasama sektor perikanan air tawar ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun petani pembudidaya ikan, meskipun untuk saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang di gunakan dalam perjanjian kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo adalah '*urf*' atau *adah*. '*Urf*' adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat kebiasaan. '*Urf*' yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³ Sedangkan secara istilah '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan

³ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 153

meninggalkan.⁴ Jadi *'urf* adalah suatu (perbuatan) yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. Sedang *adah* adalah suatu (perbuatan) yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-menerus. Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199 menjelaskan bahwa:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. al-A'raf:199).

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *'urf* tersebut yaitu:

- a. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, 1994, hlm. 387.

- c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵
- e. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.⁶

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dapat penulis analisa bahwa tradisi atau kebiasaan praktek kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo dalam pandangan Islam yaitu:

- a. '*Urf Shahih*, yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.⁷ Tradisi kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Desa Kalirejo melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
- b. '*Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.⁸ Tradisi kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo ini merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan yakni penyerahan lahan

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 2, h. 400-402.

⁶ Satria Efendi, M. Zein, *Op.Cit.*, h. 156.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 123

⁸ Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, h. 391.

kolam kepada pihak pengelola kolam berdasarkan kesepakatan pada saat akan melakukan pemeliharaan ikan.

- c. *'Urf Khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Tradisi kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo merupakan tradisi khusus karena model tradisi kerjasama sektor perikanan air tawar ini hanya berlaku bagi masyarakat Desa Kalirejo.

Kerjasama sektor perikanan air tawar atau *syirkah* ini yang sudah biasa berlaku di zaman Nabi, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat kepada persengketaan, dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan. Rasulullah Saw melihat bahwa apa yang disebut keadilan adalah kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah itu tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian maka pemilik lahan berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian di sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedang di lain pihak (penyewa) memonopoli hasil.

Berdasarkan hal tersebut maka kita dapat mengetahui bahwasanya Rasulullah Saw menghimbau kepada umatnya untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakat, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan persengketaan dan perselisihan dikalangan masyarakat Islam.

Berkaitan dengan hal ini sesungguhnya Rasulullah Saw berpesan agar bijak dalam persoalan kerjasama bagi hasil, agar dikemudian hari perselisihan dan sengketa dapat dihindari sedini mungkin. Suatu contoh perselisihan kerjasama sektor perikanan air tawar ini pernah dialami pada masa Nabi, dari Rafi bin Khadij berkata: kebanyakan pemilik tanah (lahan kolam) di Madinah melakukan *syirkah*, kami menyewakan tanah satu bahagian dari apa adanya ditentukan untuk pemilik tanah, maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat begitu juga sebaliknya oleh karena itu hal tersebut dilarang. Jadi masing-masing dari pemilik tanah dan penyewa harus ada sikap toleransi (*tasamuh*) yang tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan minta terlalu tinggi dari hasil tanahnya, begitu juga sebaliknya si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah. Sesungguhnya Rasulullah Saw tidak mengharamkan menyewakan tanah, tetapi ia memerintahkan supaya satu sama lain bersikap lemah lembut.

Kesimpulannya apabila terjadi perselisihan maka solusi atau penyelesaiannya adalah dengan cara adanya sikap toleransi antara kedua belah pihak. Begitu juga apabila di Desa Kalirejo, antara pemilik lahan dan pembudidaya ikan terjadi perselisihan atau sengketa, biasanya hal tersebut terjadi akibat adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak, karena

kebiasaan dalam berakad menggunakan cara lisan dan tidak ada bukti tertulis maka akan sangat rentan sekali dengan perselisihan, misalnya: tentang jumlah bagi hasil yang tidak sesuai, tidak adanya ganti rugi atas biaya modal yang telah dikeluarkan oleh pembudidaya ikan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanian.

Solusi yang biasanya dilakukan apabila terjadi perselisihan adalah dengan cara *rembug bareng* (musyawarah) antara kedua pihak, namun apabila dengan cara musyawarah masih buntu karena keegoisan dari masing-masing pihak, maka jalan tengahnya adalah meminta tolong kepada ulama setempat untuk menengahnya atau mendamaikannya. Itulah kebiasaan masyarakat pembudidaya ikan air tawar Desa Kalirejo apabila terjadi perselisihan, karena sesungguhnya bagi mereka kebersamaan dan kekeluargaan yang mereka utamakan dari pada mementingkan keuntungan yang tidak ada artinya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka jelaslah bahwa kerjasama sektor perikanan air tawar yang dilakukan di Desa Kalirejo itu harus didasari atas beberapa asas tersebut seperti adanya asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran, asas saling menolong dan asas kerelaan. Karena apa yang dilakukan di Desa tersebut tidak lepas dari adanya empat unsur asas ini. Walaupun dalam pandangan ekonomi Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai hukum melakukan kerjasama sektor perikanan air tawar yang didasari atas dasar adat atau kebiasaan namun apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada maka hal tersebut

diperbolehkan, sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, jadi apabila dalam perjanjian tersebut dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat, dilakukan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mendatangkan *kemudharatan*. Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa termasuk '*urf*' yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga sistem praktik kerjasama pada sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, yaitu: (a). Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik, petani ikan hanya mengelola saja, bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya penggarapan, porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan; (b). Kerjasama antara pemilik dengan penggarap dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Pengelola dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Dalam sistem kerjasama ini, pemilik hanya menunggu hasil panen, pemilik tidak turun andil dalam pengelolaan ikan; dan (c). Kerjasama antara pemilik dan penggarap, dimana keduanya ikut serta sama-sama memberikan porsi modal (biaya-biaya) dan keahlian. Tanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan ikan dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan.
2. Pelaksanaan sistem kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor perikanan air tawar masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo merupakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan konsep kerjasama bagi

hasil dalam ekonomi Islam, khususnya sistem yang pertama. Dan kerjasama tersebut dapat dikategorikan sebagai kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung madhaarat, dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik lahan (kolam) dan pembudidaya ikan, maka kerjasama bagi hasil sektor perikanan air tawar dibolehkan dan sesuai dengan ekonomi Islam.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian, dan penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran dan masukan yang mungkin ada manfaatnya, yaitu:

1. Mengingat daerah Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo sangat potensial untuk usaha perikanan air tawar, sebaiknya budidaya perikanan air tawar lebih dikembangkan lagi dengan cara dibentuknya suatu lembaga keuangan (koperasi) yang diperuntukkan khusus untuk para usahawan yang kekurangan dana (modal) dalam pelaksanaan usaha pembudidayaan ikan air tawar tersebut.
2. Hendaknya di dalam menentukan pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan kerjasama sektor perikanan air tawar menjadi tidak sah. Selain itu, toleransi yang tinggi antara kedua

belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.

3. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara para pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ads), *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, 1994.
- AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, Adhi Grafindo, Surabaya, 1994.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, Al-Ma'arif, Bandung, 2002.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Edisi ke-II, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Ali Fikri, *Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*, Mustofa al-Babil al Halabi, Mesir, tt.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawaa'idul Fiqhiyyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1994.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-9, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Ghufron A. Mas'adi., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- H. Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003.
- H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, Jakarta, 1996.
- Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram*, Cet. Ke-1, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1997.

- , *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Cet. Ke-3, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
- , *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Terjemah Moh. Rifa'i, et al. Terjemah *Khulashah Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra, Semarang, 1992.
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Yogyakarta, 2001.
- Iman 'Ala Aldin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Bagdadiy, *Tafsir Al Khazin*, Juz 2, Daru al Kutud Al Ilmiah, Libanon, Beirut, 2005.
- Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Koentjaraningrat, *Metodologi Peneitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-3, Intermasa, Jakarta, 2002.
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Dawam Raharjo, *Islam dan Informasi Sosial Ekonomi*, Cet. Ke-1, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta, 2007.
- M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- M. Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syengkity, *Ath Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19, Darul Fikr, Bairut, 1995.
- Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Nasution Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Sapidodadi, Jakarta, 1992.
- Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bakti Prima Yasa, Jakarta, 2002.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajstaani Abu Dawud , *Sunan Abu Dawud*, Juz. 3, Daar al-Fikr, Beirut, 1994.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006
- Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Yusanto M. Ismail, et al., *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. Ke-3, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cet. Ke-1, Robbani Press, Jakarta, 1997.